



DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Maulana, “Faktor-Faktor Pembentukan Daerah Otonomi Baru dan Dampaknya Terhadap Keuangan Negara,” *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, vol. 7, no. 2, Dec. 2019, doi: 10.23887/ekuitas.v7i2.17862.
- [2] H. Saksono, B. Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Jl Kramat Raya No, and S. -Jakarta, “KAINAWA,” *Jurnal Pembangunan & Budaya*, vol. 2, no. 1, pp. 1–19, 2020, doi: 10.46891/kainawa.2.2020.1-19.
- [3] A. Wardhana, B. Juanda, H. Siregar, and D. K. Wibowo, “Dampak Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Penurunan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia.”
- [4] Sjafrizal, *Ekonomi wilayah dan perkotaan / Sjafrizal*, Cetakan ke-3. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- [5] Juanda B *et al.*, *Evaluasi regulasi pengelolaan keuangan daerah dan pengaruhnya terhadap upaya peningkatan kualitas belanja daerah*. Jakarta Pusat: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2013.
- [6] A. S. Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*, 1st ed. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- [7] Z. Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro Edisi Revisi*. Banten: Lembaga Peneelitan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2013.
- [8] Nopirin, *Ekonomi Moneter, Buku II*, 1st ed. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1987. Accessed: Jul. 28, 2022. [Online]. Available: <https://onsearch.id/Record/IOS2862.UNMAL000000000022496>
- [9] BPK RI, “Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat,” 2021.
- [10] M. Y. Sijabat, C. Saleh, and A. Wachid, “Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012),” *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, vol. 2, pp. 236–243, 2015.
- [11] “UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945.”
- [12] D. Persetujuan Bersama, “DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.”



- [13] B. Juanda Masrizal, “PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB): TINJAUAN DARI ASPEK KEUANGAN.”
- [14] Susanti, “Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Kesejahteraan di Kabupaten Lampung Utara,” *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, vol. 3, no. 2, pp. 249–268, 2014.
- [15] K. R. Jumiayanti, “Analisis Location Quotient dalam Penentuan Sektor Basis dan Non Basis di Kabupaten Gorontalo.”
- [16] Nugroho I and Dahuri R, *Pembangunan Wilayah : Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, 2nd ed. Jakarta: LP3ES, 2012.
- [17] Rustadi E, Saefulhakim S, and Panuju D R, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.
- [18] Nugraha Y N, “Ketergantungan Fiskal Daerah Dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Indonesia. Kementrian Keuangan RI,” 2019.
- [19] N. Zukhrin, “KINERJA KEUANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DITINJAU DARI DERAJAT KEMANDIRIAN, KETERGANTUNGAN, DAN DESENTRALISASI FISKAL,” *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, , vol. 5(2), pp. 143–149, 2020.
- [20] K. Tarigan, “Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Sektor-sektor Berpotensi yang Dapat Dikembangkan Di Pemerintah Kota Medan,” Medan, 2007.